

Judul : Kaltim kembalikan mobil dinas, komisi II: revisi aturan fasilitas kepala daerah
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Komisi II: Revisi Aturan Fasilitas Kepala Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi aturan mengenai standar fasilitas, khususnya kendaraan dinas bagi kepala daerah. Usulan itu merupakan buntut dari polemik mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Irawan menilai, revisi standardisasi fasilitas sangat perlu dilakukan demi menyesuaikan dengan kepantasan yang bisa ditoleransi oleh masyarakat luas. Di tengah semangat efisiensi anggaran negara, setiap pengadaan sarana kerja pemerintahan daerah harus benar-benar dipertimbangkan matang.

Agar kejadian serupa tidak terulang, dia meminta Kemendagri segera melakukan revisi peraturan terkait standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemda. "Ke depan, standar tersebut diharapkan lebih mengutamakan fungsi, kepantasan, serta kemampuan keuangan daerah masing-masing," ujarnya.

Irawan berharap, polemik mobil dinas Gubernur Kaltim bisa menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya di Indonesia. Seluruh pimpinan daerah harus bisa lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk berbagai aspek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Kasus ini, sambungnya, juga

jadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengukur pantas atau tidaknya fasilitas yang digunakan oleh pemerintah daerah. Penilaian mengenai kepantasan fasilitas jabatan harus selalu selaras dengan kondisi ekonomi warga serta asas manfaat publik.

Menurutnya, tiap daerah tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyediakan sarana bagi kepala daerah sesuai kemampuan anggaran. "Namun, meski anggaran daerah tergolong besar, penguatan ekonomi masyarakat serta pelayanan publik harus jadi prioritas utama," kata politikus Golkar itu.

Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki masih cukup kuat, belanja sebaiknya difokuskan pada pemerataan pembangunan. Fokus utama Pemda harus tetap tertuju pada kesejahteraan masyarakat luas daripada pengadaan fasilitas mewah yang berlebihan.

Irawan menyebut, keputusan mengembalikan mobil dinas itu merupakan sebuah langkah yang sangat tepat. Itu patut diapresiasi karena menunjukkan Pemda mau mendengar kritik serta masukan dari masyarakat. "Meski tidak sepenuhnya salah karena sesuai regulasi, respons Gubernur Kaltim sudah sangat tepat dan bijaksana," katanya. ■ PVB